

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik seperti instansi pemerintahan, yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. *Fraud* lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Salah satu jenis *fraud* yang terjadi di instansi pemerintah yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Menurut UU 31/1999 Jo UU No 20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.

Menurut *Transparency International* berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-90 disebabkan oleh peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD, dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel, dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemasaran, *mark up* pengadaan barang hingga pengelakan

pajak.

Penanganan perkara Kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dominan dilakukan di daerah sepanjang 2018. berdasarkan sektor yang paling rentan yaitu keuangan daerah dengan 34 kasus dan total kerugian sebesar Rp144,1 miliar, kasus korupsi berdasarkan lembaga yang paling rentan terjadinya yaitu birokrasi daerah dari 210 kasus korupsi 69% terjadi di birokrasi daerah. Urutan terbanyak tersangka korupsi berdasarkan jabatan yaitu birokrat daerah, direktur, komisaris, pegawai swasta, anggota DPR/DPRD/DPD, pegawai BUMN/BUMD.

Dalam melakukan kecurangan, setiap orang atau pelaku memiliki motivasi yang beraneka ragam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori *Fraud Triangle* yang pertama kali dikembangkan oleh Cressey (2018) mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Tekanan (*pressure*) adalah motivasi dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan oleh adanya tekanan situasional yang merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh faktor keuangan maupun non keuangan yang dihadapi oleh pegawai yang sulit dipecahkan dengan cara yang legal atau etis, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi sehingga semakin tingginya keinginan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Dalam lingkup entitas, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah salah satu penyebab terjadi perilaku korupsi yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dipicu karena kompensasi diterimanya tidak manusiawi, sehingga adanya ketidakpuasan karena

kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa pencurian uang, peralatan, serta persediaan barang yang dilakukan oleh pekerja. Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Selain dari sisi peluang, kecurangan (*fraud*) juga dipengaruhi oleh pembenaran (*Rationalization*). Pembenaran (*Rationalization*) adalah pemikiran yang menganggap bahwa tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk membenarkan perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal ini dilakukan untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya.

Menurut Pramudita (2018) bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima dengan adanya kultur organisasi didalamnya. Terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Pramudita (2018) yang meneliti analisis *fraud* di sektor pemerintahan Kota Salatiga.

Fraud dapat terjadi diberbagai sektor, baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Secara umum bentuk kecurangan (*fraud*) yang banyak terjadi di sektor

pemerintahan adalah korupsi (corruption). Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menggunakan kepercayaan publik kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Upaya pencegahan pun juga telah dilakukan untuk meminimalisir adanya tindakan kecurangan dengan diwajibkannya setiap instansi pemerintah yang ada di kabupaten malaka, serta dibangunnya berbagai sistem elektronik yang berguna untuk menunjang proses transparansi dan akuntabilitas penyelenggara kegiatan pemerintah, serta pembayaran tunjangan kinerja yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan dan membangkitkan semangat para pegawai pemerintahan.

Terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan *fraud* di sektor pemerintahan, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Pramudita (2018) yang meneliti analisis *fraud* di sektor pemerintahan Kota Salatiga. Variabel yang digunakan adalah *fraud* di sektor pemerintah, gaya kepemimpinan, budaya etis organisasi, penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal, kultur organisasi, kepuasan kompensasi, terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal, kepuasan kompensasi, budaya etis organisasi, gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan dan tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi dan penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian lainnya juga dilakukan Faisal (2018) mengenai analisis *fraud* di

sektor pemerintahan Kabupaten kudus. Variabel yang digunakan adalah *fraud* di sektor pemerintahan, sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, kepuasan kompensasi, perilaku tidak etis, kultur organisasi, penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, kultur organisasi, penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat pengaruh antara kepuasan akan gaji dan kultur organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian Mustikasari (2018) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan Kabupaten Batang. Variabel yang digunakan adalah *fraud* di sektor pemerintahan, penegakan hukum, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kepuasan kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis manajemen, kultur organisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi, budaya etis manajemen, dan kultur organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul “ Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor Bupati Kabupaten Malaka)” dalam tugas akhir ini penulis akan membahas bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya *fraud* di sektor yang selama ini di sebuah instansi pemerintahan dalam mengatasi terjadinya *fraud* karena menurut peneliti masalah tersebut merupakan salah satu masalah yang sangat relevan yang terjadi instansi pemerintahan saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintah (Studi Pada Kantor Bupati Kabupaten Malaka).

1.3 Persoalan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh kepuasan kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
2. Bagaimana pengaruh kultur organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan!
2. Untuk mengetahui pengaruh kultur organisasi terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan!

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini digunakan peneliti untuk menyelesaikan salah satu syarat pada studi jenjang Sarjana pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Diharapkan juga dapat memperluas wawasan peneliti lain untuk dijadikan bahan referensi dan bahan untuk menambah pengetahuan ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya *fraud* di sektor pemerintahan.